

Pembunuh Ibu Anggota DPR Bambang Biasa Bersih-bersihkan Rumah Korban

INDRAMAYU (IM) - Casinih (62), ibu kandung anggota Komisi V DPR RI Bambang Hermanto, tewas di rumahnya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Casinih merupakan korban pembunuhan.

Dari hasil olah TKP Tim Inafis Satreskrim Polres Indramayu, Ibrahim berujar korban ditemukan dengan kondisi tidak wajar.

“Meninggal tidak wajar,” ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo saat dihubungi wartawan via sambungan telepon, Jumat (26/5).

Namun, dalam hitungan jam, polisi telah berhasil mengungkap dan menangkap

tersangkanya. Pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban.

“Tersangka adalah orang yang biasa membantu membersihkan-bersihkan rumah,” kata Kombes Ibrahim Tompo.

Aksi pembunuhan ini terjadi di dalam rumah korban, Blok Kedongdong, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Jasad korban ditemukan pada Kamis (25/5) malam. Kemudian, tak lama setelah kejadian pembunuhan tersebut, polis meringkus tersangka.

“Tersangka sementara satu orang, pria,” ujar Ibrahim Tompo. ● **mei**

KPU Dinilai Sebar Informasi Sesat Soal Eks Terpidana Maju Jadi Caleg

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengangap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengaburkan fakta soal argumentasi hukum di balik aturan pencalangan yang dianggap memudahkan eks terpidana korupsi.

Aturan ini ada pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023. Pasal itu memberi pengecualian bahwa eks terpidana dengan ancaman 5 tahun penjara atau lebih tak perlu menunggu masa jeda 5 tahun usai bebas murni untuk bisa maju sebagai caleg, seandainya yang bersangkutan juga telah menjalani vonis tambahan berupa pencabutan hak politik.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana berharap Hasyim tidak menubar informasi sesat kepada masyarakat.

“Mengapa penting disampaikan bahwa Saudara Hasyim menubar informasi sesat? Sebab, ia hanya mencuplik bagian yang sebenarnya tidak menjadi amar dalam putusan MK dan berupaya menga-

burkan fakta sebenarnya,” ungkap Kurnia dalam keterangannya, Jumat (26/5).

Sebagai informasi, pemberian masa jeda 5 tahun usai bebas murni itu merupakan persyaratan baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusan perkara nomor 87/PUU-XX/2022 dan 12/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusan, MK tidak menyebut soal pengecualian terhadap eks terpidana yang telah menjalani vonis tambahan pencabutan hak politik.

Namun, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari beralasan, ketentuan pengecualian itu dimasukkan ke dalam Peraturan KPU karena pihaknya merujuk pada bagian pertimbangan putusan tadi.

Pernyataan yang dimaksud Hasyim ada pada bagian pertimbangan putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022, khususnya halaman 29, meski majelis hakim menggunakan istilah “pencabutan hak pilih” bukan “pencabutan hak politik”. ● **mei**

52 WNA Sindikat Fraud Jaringan Internasional di Jakarta Dideportasi

JAKARTA (IM) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Ditpidum) Bareskrim Polri mengawal deportasi warga negara (WN) Tiongkok yang diduga terlibat penipuan atau fraud jaringan internasional via media elektronik di Jakarta. Setidaknya ada 52 WN Tiongkok yang telah dideportasi.

“Kami telah melakukan pengawalan proses pemulangan atau deportasi 52 warga negara asing asal China yang terlibat jaringan penipuan internasional,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Ditpidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Raharjo Puro dalam keterangan tertulis, Jumat (26/5).

Djuhandhani mengatakan masih ada tiga WN Tiongkok yang belum dideportasi. Dia mengatakan deportasi 52 WN China itu dilakukan pada Kamis (25/5).

“Tiga orang WNA belum dideportasi karena masih proses pengurusan dokumen perjalanannya,” ujarnya.

Deportasi yang dilakukan Imigrasi itu dibagi menjadi tiga kloter keberangkatan. Deportasi pertama sebanyak 8 orang, deportasi kedua sebanyak 13 orang, dan deportasi ketiga sebanyak 31 orang.

“Deportasi ini merupakan ranah Imigrasi. Bareskrim hanya melakukan pengawalan untuk memastikan proses pemulangan 52 pelaku fraud

ini berjalan lancar. Anggota memastikan paspor WNA telah dicap stempel deportasi oleh Imigrasi dan sampai masuk pesawat sesuai tujuan,” tuturnya.

Sebelumnya, Ditpidum Bareskrim menangkap 55 WNA di Jakarta Selatan (Jaksel) hingga Jakarta Timur (Jaktim). Puluhan warga asing itu ditangkap karena diduga terlibat penipuan atau fraud jaringan internasional via media elektronik.

Selain itu, kata Djuhandhani, pihaknya juga menangkap enam warga Indonesia dalam kasus ini. Para pelaku diduga menipu dengan modus, salah satunya, mengaku sebagai polisi dan memeras korban.

“Kemudian warga negara asing itu 55, di mana 50 laki-laki dan 5 perempuan. Kemudian warga negara Indonesia 5 laki-laki dan 1 perempuan,” kata Djuhandhani di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (5/4) lalu.

Sebanyak 55 WNA dan 6 WNI itu ditangkap di lokasi berbeda, yakni Jalan Selat Batam B10 Nomor 14 Duren Sawit, Jaktim; Jalan Pejaten Barat 4 Nomor 43A, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jaksel; dan Jalan Sawo 2 Nomor 71 Kebayoran Baru, Jaksel. ● **han**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



HASIL SELEKSI JABATAN DIRUT BAKTI KOMINFO

Plt Menkominfo Mahfud MD (tengah) didampingi Sekjen Kemenkominfo Mira Tayyiba (kiri) dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Hary Budiarto menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan seleksi jabatan Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo 2023-2028 di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (26/5). Mahfud menyatakan panitia seleksi jabatan Dirut BAKTI telah melaksanakan seleksi terbuka sejak 11 April 2023, namun dari tes administrasi hingga tahap asesment panitia tidak mendapatkan calon yang memenuhi kompetensi sehingga akan diadakan seleksi terbuka ulang.

Golkar - PAN Penuhi PT 20 Persen, Airlangga dan Zulhas Duet di 2024?

Airlangga dan Zulhas merupakan pasangan yang sangat realistis dan sudah memenuhi syarat menggenapi ambang batas capres 20 persen.

JAKARTA (IM) - Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) jika berkoalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024, sudah memenuhi syarat presidential threshold alias ambang batas pencalonan presiden, meskipun tanpa Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Jumlah kursi Golkar dan PAN jika digabungkan menjadi 129 kursi atau 22,43 persen jumlah total kursi di parlemen. Partai Golkar saat ini memiliki total kursi par-

lemen 85 atau sebesar 14,78 persen. Sedangkan, PAN memiliki 44 kursi atau 7,65 persen jumlah total kursi di parlemen.

Oleh karena itu, duet Airlangga Hartarto -Zulkifli Hasan (Zulhas) dinilai pilihan yang rasional dan menjanjikan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.

“Airlangga-Zulhas merupakan pasangan yang sangat realistis dan sudah menggenapi ambang batas presiden 20

persen,” ujar Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, Jumat (26/5).

“Dua partai pengusung Golkar dan PAN dijamin mendapatkan *coattail effect* (efek ekor jas, red) di pileg. Terlepas besar kecil *coattail effect*nya seperti apa,” tandasnya.

Rektor Paramadina Prof. Didik J Rahbini menambahkan, dari sisi kinerja, Airlangga dan Zulhas juga dianggap klop dan saling melengkapi.

“Keduanya telah menunjukkan kerja yang baik di bidang ekonomi dalam pemerintahan. Tantangan pemerintahan ke depan adalah persoalan ekonomi,” kata Prof. Didik J.

Diketahui, di tengah

perbincangan hangat mengenai paket-paket capres-cawapres serta koalisi parpol jelang Pilpres 2024, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulhas melakukan pertemuan di Amerika Serikat usai pertemuan tingkat menteri APEC.

Keduanya terlihat tampak santai dan akrab di tengah munculnya wacana duet Airlangga-Zulhas sebagai pasangan kuda hitam.

“Kami memang sejak lama bersama-sama kuat dan yang paling penting punya tiket,” kata Airlangga di McNamara Airport, Detroit, Amerika Serikat, Kamis (25/5).

“Kami sejak awal di KIB (Koalisi Indonesia Bersatu, red). Komunikasi sangat baik dan gubub,” katanya.

Namun saat ditanya soal kemungkinan berpasangan dengan Zulhas pada Pilpres 2024, Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tersenyum.

“Saya dan Pak Zul punya hubungan yang sangat baik. Kami sering komunikasi, bertukar pikiran, mencari solusi terbaik untuk berbagai persoalan bangsa ini. Di kabinet, saat ini kami sama-sama di bidang ekonomi,” ujar Airlangga.

KORUPSI EKS WALI KOTA BEKASI

Kasasi Ditolak, MA Tetap Vonis Rahmat Effendi 12 Tahun Penjara

JAKARTA (IM) - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Rahmat Effendi. Eks Wali Kota Bekasi itu tetap dihukum 12 tahun penjara. Pria yang akrab disapa Bang Pepen itu terbukti melakukan korupsi.

Putusan MA tertuang pada Nomor 1899 K/Pid. Sus/2023. Kasasi diputus oleh Ketua Majelis Soesilo pada Rabu (24/5) lalu.

“Amar putusan, tolak kasasi terdakwa dan penuntut umum (PU),” tulis amar putusan tersebut dilansir dari laman kepaniteraan Mahkamah Agung, Jumat (26/5).

Dalam amar putusan tersebut juga dimuat perbaikan yaitu mengenai barang bukti dan pencabutan hak politik Rahmat Effendi yang menjadi tiga tahun. Pada tingkat Banding dengan nomor putusan 48/PID.TPK/2022/PT BDG, Pepen dicabut hak politiknya selama lima tahun.

“Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun terhitung terpidana selesai menjalani pidana pokonya,” tulis keterangan itu.

Sekadar informasi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memperberat vonis mantan Wali

Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen menjadi 12 tahun penjara. Putusan ini lebih berat dari vonis Pengadilan Tipikor Bandung yang hanya sepuluh tahun.

Kendati demikian, Hakim Pengadilan Tinggi belum menerapkan pembebanan uang pengganti terhadap Rahmat Effendi. Atas dasar itu, KPK mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Rahmat Effendi dijatuhi hukuman akibat kasus persekongkolan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. ● **mar**

FOTO: ANT



PEMERIKSAAN TERSANGKA SUAP PEMBANGUNAN JALUR KA

Tersangka kasus suap Muchamad Hikmat (kedua kiri) berjalan saat akan menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/5). Muchamad Hikmat yang merupakan Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma tersebut menjalani pemeriksaan terkait kasus penerimaan suap pembangunan pemeliharaan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022.

Perempuan Lebih Condong Pilih Capres Berlatar Belakang Militer

JAKARTA (IM) - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Komunitas Hariqo Satria menyurvei hasil survei Litbang Kompas, yang menunjukkan bahwa mayoritas memilih perempuan (20,9%) menginginkan capres berlatar belakang militer yang sebelumnya menginginkan berlatar belakang kepala daerah.

Berdasarkan survei itu, pemilih perempuan juga lebih condong memilih karakter pemimpin yang berwibawa dan tegas sebagai kriteria utama ketimbang sebelumnya yang merakyat dan sederhana.

Hariqo mengatakan ada sejumlah alasan dari pergeseran itu. Salah satunya adalah karena faktor Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Meningkatnya pilihan pada latar belakang militer ya karena mereka menyukai Prabowo Subianto,” kata Hariqo.

Hariqo juga menyurvei dari pandangan atas organisasi TNI di balik meningkatnya keinginan perempuan agar Indonesia dipimpin oleh presiden berlatar belakang militer.

“Karena TNI adalah lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat. Ini tergambar di berbagai survei lainnya juga,” ucapnya.

Faktor lain yang juga disorot Hariqo yakni fenomena banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

“Mereka tak lagi ingin dipimpin latar belakang kepala daerah karena banyak kasus korupsi dan kepala daerah dianggap tidak memenuhi janji-janji saat kampanye,” kata Hariqo.

Adapun, pemilih perempuan cenderung menyadari adanya ketidakpastian situasi dunia dan nasional saat ini karena perang yang berkepanjangan di Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi kehidupan di dalam negeri Indonesia sendiri.

“Perang Rusia dan Ukraina, ancaman di Laut Cina Selatan, ulah KKB di Papua, masih adanya potensi ancaman dari kelompok radikal di Indonesia, kekhawatiran Indonesia akan terbelah dan sebagainya,” jelas Hariqo. ● **han**

mandiri
PENAWARAN PENGAHALIHAN PIUTANG (Cessie)

Bahwa dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan penjualan atau pengalihan piutang (Cessie) terhadap debitur sebagai berikut:

Nama	Alamat	Jumlah Tagihan Per Tgl 26 Mei 2023	Agunan Kredit
Hadi Soebadio	Jl. Raya Kampus Pramita, Kp. Galuga RT. 02 RW. 05 Kel. Curing Kec. Curing Kab. Tangerang Banten 15810	Rp. 201.693.509,00	Jl. Raya Kampus Pramita, Kp. Galuga RT. 02 RW. 05 Kel. Curing Kec. Curing Kab. Tangerang Banten 15810

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan kredit debitur di atas dapat menyampaikan penawaran secara tertulis ke alamat dibawah ini paling lambat tanggal 12 Juni 2023, jam 15.00 WIB.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Retail Collection & Recovery Group
Regional Retail Collection & Recovery Region IV / Jakarta 2
Wisma Mandiri II Lt.19
Jl. Kebon Sirih No.83, Jakarta 10340.

Demikian untuk di ketahui semua pihak.

Jakarta, 27 Mei 2023
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk